

Sekolah Negeri di Kawasan Industri Bekasi tidak Layak Pakai

BEKASI (IM) - Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukadaya 02 di Kampung Pengarengan RT 003, RW 001, Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, tak ubahnya seperti kandang kambing. Ironisnya, sekolah negeri yang berada di kawasan Industri terbesar se-Asia Tenggara itu hanya berjarak 39 kilometer (Km) atau 1,5 jam perjalanan baik itu dari Istana Negara, Jakarta, dan Kantor Bupati Bekasi.

Kondisi miris dan sangat memprihatinkan ini sudah tampak sejak dari luar halaman sekolah. Dari pinggir Jalan Srimahi, akses masuk sekolah sudah tertutup oleh deretan bangunan rumah toko milik warga. Tidak ada pagar. Jalan masuk sekolah selebar sekitar 1 meter lebih yang cuma bisa dilewati kendaraan roda dua terjerit oleh sepetak tanah milik Balai Pengairan.

Sejumlah kambing milik warga berkeliaran bebas persis di dalam halaman sekolah. Ketika masuk di halaman sekolah, terlihat dari kisi-kisi kondisi plafon bangunan yang rusak parah. Seluruh plafon pada 6 ruangan kelas hancur bolong-bolong dan bahkan sebagian sudah copot. Sedangkan pada sisi kiri terlihat bangunan WC sekolah baik itu yang lama maupun yang baru berumur 2 tahun sudah hancur tak berfungsi.

Adapun pintu-pintu ruangan kelas hanya berkunci gembok. Sementara bagian jendela kaca sejumlah kelas sudah hancur sehingga siapapun dengan mudah masuk ke dalam kelas yang dindingnya penuh coretan-coretan vandalisme.

Di dalam ruangan kelas hanya terdapat sedikit bangku. Bahkan pada ruangan kelas 6 sudah tidak ada bangku sama sekali. Sedangkan pada bagian atas beberapa kelas terlihat balok besar di genteng sehingga di kala hujan air dengan deras bisa masuk ke ruangan kelas. "Bangunan sekolah ini sejak

22 tahun lalu dibangun sampai sekarang belum pernah diperbaiki. Sedangkan kondisi sekolah yang makin rusak tanpa bangku dan meja telah berlangsung 5 tahun terakhir. Bangku dan meja yang sudah patah dan hancur harus dibakar karena bisa membahayakan," kata Suwandi, Guru SDN Sukadaya 02, kemarin.

Dikatakannya pihak sekolah tidak pernah berpangku tangan. Lantaran setiap bulannya, selama 22 tahun, pihak sekolah selalu melaporkan kondisi kerusakan dan masalah sarana prasarana di sekolah itu ke pemerintah daerah. Bahkan proposal usulan untuk membangun total sekolah telah turut diserahkan.

"Setelah ramai ini, baru pada Rabu (24/8) lalu datanglah dari Dinas Pendidikan dan UPTI Pembangunan ke sekolah. Mereka mengabarkan sekolah ini akan dibangun total karena sudah masuk anggaran pada 2023. Mereka minta sekolah ini janganlah terlalu disorot lagi," ungkap Suwandi.

Mendapatkan kabar terakhir itu, kata Suwandi, tentu saja pihak sekolah dan warga sekitar sangat senang. Pasalnya, terdapat 330 siswa yang merupakan warga dari Desa Sukadaya, Sukamaju, dan Srimahi. Impian warga, sekolah dibangun layak dengan dua lantai di areal tanah sekolah seluas 1.500 meter persegi dengan model seperti sekolah negeri lainnya. Apalagi APBD Kabupaten Bekasi tergolong sangat besar yakni mencapai Rp6,39 triliun.

"Sekarang ini terdapat 330 siswa. Kita bagi dua sesi rombongan belajar yakni pagi dan siang. Untuk jumlah siswa maksimal 28 orang setiap kelas. Mereka dipas-paskan duduk di bangku meja yang ada. Sedangkan kelas 6, harus rela belajar di kelas tanpa bangku dan meja," jelas Suwandi seraya menambahkan ada 18 tenaga pengajar termasuk kepala sekolah di SDN Sukadaya 02. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



DPRD AJUKAN PEMBENTUKAN PANSUS

Wagub DKI Pastikan Belum Ada Temuan Jual Beli Jabatan

Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan proses rekrutmen ASN di DKI melalui proses termasuk melalui kompetensi. "Itu ada tahapannya, tidak ujug-ujug begitu ditunjuk. Dan sampai hari ini belum ada, ditemukan (jual beli jabatan)," katanya.

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan hingga saat ini belum ada temuan jual beli jabatan di lingkungannya. Hal itu disampaikan mengacu kepada penelusuran Inspektorat.

"Sampai hari ini belum ada, jadi apa yang disampaikan teman-teman sampai saat ini belum ada, belum ditemukan (jual beli jabatan)," kata Riza Patria di Jakarta, kemarin.

Selain itu, pihaknya juga belum menerima laporan ada-

nya oknum yang meminta uang atau ada ASN yang diminta uang untuk mendapatkan jabatan tertentu.

Riza memastikan proses rekrutmen ASN di DKI melalui proses termasuk melalui kompetensi. "Itu ada tahapannya, tidak ujug-ujug begitu ditunjuk, semua prosesnya diusulkan, ada Baperda, diusulkan baru dapat SK dan sebagainya, harus memenuhi kompetensi dan syarat tidak mudah," katanya.

Meski begitu, Riza meng-

harga masukan yang disampaikan terkait isu jual beli jabatan ASN tersebut yang disampaikan ketika DPRD DKI melakukan rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI. "Mudah-mudahan semua proses rekrutmen penunjukan di Pemrov DKI sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada," ucapnya.

Pembentukan Pansus

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono bakal mengajukan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait dugaan jual beli jabatan itu. "Yang bisa menguak (jual beli jabatan) itu kalau sudah terbentuk pansus, itu pasti akan terbuka semuanya," kata Gembong di Jakarta, Rabu (24/8).

Politikus PDI Perjuangan

KIRAB MERAH PUTIH

Sejumlah peserta membentangkan Bendera Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (28/8). Sebanyak 50.000 orang membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.700 meter dari kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia bertepatan 'Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat'.

Mujiyono belum mengetahui apakah pimpinan DPRD DKI Jakarta bakal menyetujui pembentukan pansus kepegawaian. Sebab, usai pembentukan pansus diusulkan, pimpinan DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat pimpinan gabungan (rapingab) untuk mengambil keputusan terkait usulan tersebut.

Jika pembentukan pansus disetujui, lanjut Mujiyono, setiap fraksi akan mengajukan anggotanya untuk bergabung dalam pansus. "Ya, (pembentukan pansus) tergantung (keputusan) pimpinan (DPRD DKI)," sebut Mujiyono.

"Kan setelah pengajuan (pembentukan pansus), pimpinan DPRD DKI menggelar rapatingab, lalu setiap fraksi mengajukan anggotanya (untuk bergabung dalam pansus)," sambung dia.

Setelah itu, DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna untuk meresmikan pembentukan pansus. ● yan

DKI Siap Tuan Rumah Forum Urban 20

JAKARTA (IM) - DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah Urban 20 (U20) Mayors Summit. Acara yang akan diselenggarakan pada 30-31 Agustus, menjadi forum kepemimpinan Jakarta pada U20 tahun ini.

Konferensi Tingkat Tinggi (KIT) ini salah satunya akan memberi kesempatan bagi para pemimpin kota U20 untuk memperkuat kolaborasi dan berikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia pada G20 Leaders Summit yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 15-16 November 2022 mendatang.

Baswedan mengatakan event ini sebagai wadah diskusi saling tukar pikiran, ide, dan gagasan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dengan lebih baik. "Dengan semakin meng-kota-nya dunia ini, maka kota memiliki peran penting sebagai garda terdepan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh warga kota," kata Anies dalam keterangan, Sabtu (27/8).

Melalui U20, kota-kota yang mewakili negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah nasional untuk mengatasi tantangan paling

mendesak yang dihadapi dunia, termasuk pemulihan krisis akibat pandemi covid-19, darurat iklim, dan peningkatan ketimpangan struktural.

Pada tahun ini, U20 akan berfokus pada isu dan tantangan yang dihadapi oleh kota-kota akibat pandemi covid-19. Sehingga tema yang diangkat adalah "Kota Pascapandemi".

Ada tiga bidang utama yang akan dibahas, yaitu Investasi Kesehatan dan Perumahan Rakyat sebagai Landasan Pemulihan Ekonomi dan Sosial untuk Semua, Mendorong Transisi Energi Berkelanjutan dan Akses yang Adil untuk Mobilitas

Berkelanjutan, dan Memberikan Edukasi dan Pelatihan tentang Masa Depan Pekerjaan demi Akses Pasar Kerja yang Merata untuk Semua.

Selain itu diselenggarakan tiga acara pendukung yang berlangsung secara paralel pada 30 Agustus 2022, pada pukul 09.00-11.30 di Hotel Fairmont Jakarta dan Perpustakaan Nasional sebagai berikut: "International Symposium Catalyzing Economic Recovery through Urban Regeneration", diselenggarakan bersama World Bank. 2. "High Level Talk-show: Service innovation in GBV prevention and response as part

of inclusive social recoveries in DKI Jakarta", diselenggarakan bersama United Nations Development Programme (UNDP). 3. "Digital Governance in Accelerating Sustainable Development and Climate Resiliency", diselenggarakan bersama dengan Smart Change Project & UCLG ASPAC. 4. "Urban Infrastructure for Circular Economy and a Just Transition", diselenggarakan bersama dengan Global Solutions Initiative. 5. "Enabling Cities, Caring Cities", diselenggarakan oleh The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). ● yan

Butuh Puluhan Miliar untuk Sulap Kota Tua Jadi Zona Rendah Emisi

JAKARTA (IM) - Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyebutkan anggaran revitalisasi Kota Tua di Jakarta Barat mencapai puluhan miliar bertujuan untuk menyulap kawasan tersebut menjadi zona rendah emisi.

"Kenapa bisa hingga puluhan miliar, karena digunakan untuk menyulap Kota Tua menjadi kawasan pedestrian untuk menunjang penerapan zona rendah emisi atau *low emission zone* (LEZ)," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat

dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Hari menerangkan revitalisasi tersebut di antaranya adalah pembuatan trotoar, selterbusway, air mancur, dan penataan lampu.

Hari menerangkan, anggaran puluhan miliar yang digunakan dalam revitalisasi ini bukan berasal dari APBD DKI Jakarta, tetapi dari pihak swasta ketika meminta izin lokasi melalui penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L).

SP3L sendiri merupakan kewajiban bagi pihak swasta atau pengusaha yang melakukan pembangunan kawasan di atas 5.000 meter di Jakarta.

"Anggaran revitalisasi ini berasal dari skema Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi atau Lahan (SP3L) dari tiga swasta PT MEA, PT Aruna, dan PT PJB," ujar Hari.

Lebih lanjut, Hari menerangkan bahwa revitalisasi Kota Tua Jakarta belum sepenuhnya selesai.

"Masih ada beberapa sudut wilayah yang harus dipoles lagi. Selter itu tinggal dirapikan sedikit saja, paling minggu kelar dan yang lainnya tinggal tahap finishing," tutur Hari.

Total luas fasilitas pejalan kaki yang tersedia setelah revitalisasi mencapai 329 ribu meter persegi. Jalanan di depan Stasiun Jakarta Kota misalnya, kini telah disulap menjadi kawasan pejalan kaki yang luas dari sebelumnya merupakan akses kendaraan bermotor.

Hari menuturkan revitalisasi memakan waktu lama karena sejumlah faktor. Pertama, dangkalnya pondasi trotoar pernah menyebabkan tanah longsor sehingga harus dilakukan perubahan pondasi di bagian dalam, serta juga terdapat beberapa rancangan yang mengalami perubahan.

Kedua, pemerintah DKI perlu memindahkan utilitas PT Kereta Api Indonesia (KAI) termasuk utilitas air bersihnya.

"Itu yang membuat lama. Harusnya sudah selesai. Tapi ini sudah tak lama paling sepekan," ucap dia. ● yan

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN		LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN			
30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021		UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 2021		UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 2021			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
A S E T		LIABILITAS DAN EKUITAS		2022		2021	
	30 Juni 2022	31 Desember 2021	30 Juni 2022	31 Desember 2021	2022	2021	2021
ASET LANCAR			LIABILITAS		1.921.446.361	412.461.850	
Kas dan bank	141.245.988.820	142.641.092.552	LIABILITAS JANGKA PENDEK	254.754.888	(993.913.056)	(648.295.438)	
Piutang usaha - pihak ketiga	248.103.336	160.524.783	Utang usaha - pihak ketiga	106.789.963	927.533.305	(235.833.588)	
Piutang lain-lain - pihak ketiga	-	74.560.367	Utang lain-lain - pihak ketiga	54.422.510	-	-	
Persewaan	451.956.987	531.855.060	Utang pajak	545.207.689	(13.717.752)	(68.902.518)	
Aset lancar lainnya	29.084.238	59.956.250	Biaya masih harus dibayar	507.135.696	(1.984.201.759)	(2.190.773.116)	
			Utang muka pelanggan	519.053.081	(81.913.189)	(337.159.361)	
Total Aset Lancar	141.975.133.381	143.464.989.012	Total Liabilitas Jangka Pendek	1.498.310.746	(93.079.052)	(1.802.824.585)	
			LIABILITAS JANGKA PANJANG	266.210.670	-	311.640.534	
ASET TIDAK LANCAR			Liabilitas imbalan pascakerja	266.210.670	-	-	
Aset pajak tangguhan	557.770.281	557.770.281	TOTAL LIABILITAS	1.764.521.416	(93.079.052)	(1.491.184.051)	
Aset tetap - neto	659.861.916.472	660.344.573.114	EKUITAS	800.111.150.400	(993.079.052)	(1.491.184.051)	
			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	800.111.150.400	800.111.040.400	800.111.040.400	
Total Aset Tidak Lancar	660.419.686.753	660.902.343.395	Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham	8.892.032	8.892.032	8.892.032	
			Modal dasar - 24.000.000.000 saham	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
			Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.021.111.504 saham dan 8.021.111.404 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
			Saldo laba (defisit)	274.860	274.860	274.860	
			Tambahan modal disetor - neto	800.606.411.457	801.599.599.423	801.599.599.423	
			Saldo laba (defisit)	23.887.261	23.887.261	23.887.261	
			Ditentukan penggunaannya	800.630.298.718	801.623.258.970	801.623.258.970	
			Belum ditentukan penggunaannya	274.860	274.860	274.860	
			Akumulasi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja-neto	802.394.820.134	804.367.332.407	804.367.332.407	
TOTAL ASET	802.394.820.134	804.367.332.407	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	802.394.820.134	804.367.332.407	804.367.332.407	

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN						
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 2021						
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)						
Saldo 1 Januari 2021	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk		Akumulasi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja-neto	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan nonpengendali	Total ekuitas
	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor - neto				
800.109.200.400	8.736.032	1.000.000.000	6.450.893.315	807.568.829.747	26.566.367	807.595.396.114
240.000	19.200	-	-	259.200	-	259.200
-	-	-	(1.491.570.299)	(1.491.570.299)	386.248	(1.491.184.051)
Saldo 30 Juni 2021	800.109.440.400	8.755.232	1.000.000.000	4.959.323.016	26.952.615	806.104.471.263
800.111.040.400	8.883.232	1.500.000.000	(20.599.069)	801.599.599.423	23.659.547	801.623.258.970
110.000	8.800	-	-	118.800	-	118.800
-	-	-	(993.306.766)	(993.306.766)	227.714	(993.079.052)
Saldo 30 Juni 2022	800.111.150.400	8.892.032	1.500.000.000	1.013.905.835	23.887.261	800.630.298.718

Catatan:
1. Informasi keuangan diatas diambil dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2022 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 (tidak diaudit).
2. Informasi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sulianto Fahmi Bambang & Rekan yang memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 27 April 2022.

Bali, 29 Agustus 2022

PT. Surya Permata Andalan Tbk.

ttt

Direksi

MAESTRO 90 ADV